

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS PENGURUS YAMSA DALAM PENDAMPINGAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI MERAUKE

Akbar Silo ¹, Urip Wahyudin ^{2*}, Yans Hans Hamadi ³

Universitas Cenderawasih ^{1,2*,3}

*Corresponding author: wahyudinkaliacai@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted:

September 21, 2026

Review:

September 25, 2026

Accepted:

September 30, 2026

Available online:

September 30, 2026

Sitasi Artikel (APA) :

Silo, A., Wahyudin, U., &
Hamadi, Y. (2026).

PELAKSANAAN
BIMBINGAN TEKNIS
PENGUATAN KAPASITAS
PENGURUS YAMSA DALAM
PENDAMPINGAN
KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL DI MERAUKE.

Aktivasi: Jurnal

Pemberdayaan Masyarakat,
8(1), 167-182.

[https://doi.org/10.37858/
aktivasi.v8i1.809](https://doi.org/10.37858/aktivasi.v8i1.809)

DOI:

[https://doi.org/10.37858/
aktivasi.v8i1.809](https://doi.org/10.37858/aktivasi.v8i1.809)



This work is
licensed under a [Creative
Commons Attribution-
ShareAlike 4.0
International License](#).

ABSTRAK

Penguatan kapasitas lembaga lokal merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT), terutama pada wilayah dengan keragaman sosial budaya dan kendala aksesibilitas seperti Kabupaten Merauke. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan yang dilakukan untuk memperkuat kapasitas pengurus Yayasan Asmat Maju dan Sejahtera (YAMSA) Cabang Merauke. Pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, andragogi, dan berbasis kebutuhan melalui tahapan koordinasi, asesmen kebutuhan, bimbingan teknis, simulasi dan praktik, pendampingan lapangan, monitoring, refleksi, serta tindak lanjut kelembagaan. Data kegiatan dihimpun melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan catatan proses pelaksanaan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa proses penguatan kapasitas berlangsung melalui tiga fokus utama, yaitu perencanaan program berbasis kebutuhan, keterampilan pendampingan partisipatif, serta monitoring dan evaluasi sederhana. Pada tahap lapangan, pengurus terlibat dalam diskusi komunitas, identifikasi masalah dan potensi, pemetaan aktor, praktik fasilitasi, pencatatan kegiatan, dan pembahasan tindak lanjut. Kegiatan juga memperkuat perhatian terhadap tata kelola organisasi, dokumentasi, koordinasi, serta penggunaan modal sosial dan kearifan lokal dalam pendampingan. Pengabdian menegaskan bahwa bimbingan teknis yang diikuti praktik lapangan dan refleksi lebih sesuai untuk mempertemukan kebutuhan kelembagaan dengan konteks pemberdayaan KAT di Merauke.

Kata Kunci: bimbingan teknis; *capacity building*; Komunitas Adat Terpencil; pendampingan partisipatif

ABSTRACT

Strengthening the capacity of local institutions is an important part of improving the quality of assistance for Remote Indigenous Communities (KAT), especially in areas with socio-cultural diversity and accessibility constraints such as Merauke Regency. This community service activity aims to describe the process of implementing technical guidance and assistance carried out to strengthen the capacity of the management of the Asmat Maju dan Sejahtera (YAMSA) Merauke Branch. The implementation uses a participatory, andragogical, and needs-based approach through the stages of coordination, needs assessment, technical guidance, simulation and practice, field assistance, monitoring, reflection, and institutional follow-up. Activity data was collected through interviews, focus group discussions, participatory observation, documentation studies, and implementation process notes. The results of the community service show that the capacity building process takes place through three main focuses, namely needs-based program planning, participatory assistance skills, and simple monitoring and

evaluation. At the field stage, the management is involved in community discussions, identification of problems and potentials, mapping actors, facilitation practices, recording activities, and discussion of follow-up actions. The activity also strengthens attention to organizational governance, documentation, coordination, and the use of social capital and local wisdom in assistance. The service emphasizes that technical guidance followed by field practice and reflection is more appropriate to meet institutional needs with the context of KAT empowerment in Merauke.

Keywords: *technical guidance; capacity building; remote indigenous communities; participatory assistance*

Pendahuluan

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) membutuhkan lebih dari sekadar penyaluran program dan bantuan. Proses pendampingan harus mampu mempertemukan kebutuhan dasar, kapasitas masyarakat, struktur sosial, nilai budaya, serta akses terhadap sumber daya dan pelayanan. Dalam perspektif pengembangan komunitas, masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek yang terlibat dalam mengenali persoalan, menentukan prioritas, dan mengembangkan solusi berdasarkan konteksnya sendiri (Ife, 2016). Hal ini menjadi penting di Kabupaten Merauke karena karakter geografis dan keragaman komunitas adat menuntut strategi yang fleksibel, partisipatif, dan sensitif terhadap struktur sosial lokal.

Laporan kegiatan yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa sebagian komunitas sasaran masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, informasi, peluang ekonomi, dan jaringan kelembagaan. Pada saat yang sama, komunitas memiliki kekuatan berupa hubungan kekerabatan, kepemimpinan lokal, solidaritas, pengetahuan lingkungan, serta mekanisme musyawarah yang dapat menjadi modal dalam proses pemberdayaan. Kajian mengenai masyarakat Marind di Merauke juga menunjukkan bahwa nilai kolektif, kepemimpinan adat, tanggung jawab komunal, dan pengetahuan lokal tetap memiliki peran dalam kehidupan sosial serta dapat mendukung tata kelola yang lebih responsif terhadap budaya setempat (Manik, 2022; Silubun et al., 2024; Tambajong et al., 2025).

Kondisi tersebut menempatkan lembaga pendamping lokal pada posisi strategis. Yayasan Asmat Maju dan Sejahtera (YAMSA) Cabang Merauke merupakan lembaga sosial yang berinteraksi dengan masyarakat dan memiliki peluang untuk menjembatani kebutuhan komunitas dengan sumber daya di luar komunitas. Kedekatan sosial dan kelembagaan memberi keuntungan dalam membangun komunikasi, tetapi kedekatan tersebut tetap memerlukan dukungan kapasitas teknis dan tata kelola organisasi. Literatur mengenai organisasi nonpemerintah menunjukkan bahwa efektivitas lembaga tidak hanya ditentukan oleh sumber daya, melainkan juga oleh kapasitas merencanakan, mengelola, membangun relasi, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal (Bryan, 2019; Fu & Shumate, 2020; Langmann et al., 2024).

Identifikasi awal terhadap kebutuhan penguatan pengurus YAMSA tidak hanya bersumber pada laporan kegiatan sebagai dokumen akhir, tetapi ditelusuri melalui percakapan terarah dan wawancara, FGD, observasi selama proses kegiatan, serta penelaahan dokumen organisasi. Bukti awal dari beberapa sumber tersebut menunjukkan kebutuhan penguatan pada perencanaan program berbasis kebutuhan dan potensi lokal, teknik pendampingan partisipatif, monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan,

koordinasi kelembagaan, serta manajemen organisasi. Dengan demikian, kebutuhan penguatan YAMSA dirumuskan dari temuan lapangan dan dokumen organisasi, bukan semata-mata asumsi tim pengabdian. Persoalan tersebut saling berkaitan. Perencanaan yang baik tidak akan cukup jika pendamping tidak mampu memfasilitasi partisipasi masyarakat; sebaliknya, fasilitasi yang baik membutuhkan dukungan sistem organisasi, dokumentasi, serta monitoring agar proses dapat dipelajari dan diperbaiki secara berkelanjutan. Kajian tentang KAT di Indonesia memperlihatkan bahwa tantangan pemberdayaan sering muncul pada aspek persiapan, kesinambungan program, ketepatan strategi, dan kemampuan menghubungkan intervensi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Sidiq (2020a) menunjukkan bahwa persiapan pemberdayaan perlu didasarkan pada analisis kebutuhan, potensi, dan peluang sinergi lintas sektor. Dalam studi lain, Sidiq (2020b) menekankan pentingnya model pemberdayaan KAT yang melibatkan koordinasi antarlevel pemerintahan dan identifikasi kondisi lokal. Trenggano et al. (2020) juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan KAT membutuhkan pemahaman, komitmen, dan sinergi di antara pelaksana. Sementara itu, Lede Bili dan Nugroho E.W. (2023) menunjukkan bahwa keberlanjutan program menjadi salah satu kendala utama setelah proses pemberdayaan dilaksanakan

Pengabdian dan penelitian yang lebih baru turut memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan penghargaan terhadap konteks lokal. Rantika dan Rahman (2025) menggambarkan keterbatasan akses layanan dasar pada komunitas KAT dan kebutuhan pemberdayaan yang lebih kontekstual. Enala et al. (2025) menunjukkan bahwa fasilitasi yang sensitif terhadap nilai lokal dapat membuka ruang partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Di Papua Selatan, kegiatan Simangunsong et al. (2024) memperlihatkan bahwa observasi, perencanaan berbasis masalah, pelaksanaan, dan evaluasi dapat menjadi rangkaian yang relevan dalam kegiatan pengabdian. Azis et al. (2026) juga menekankan arti kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat adat Marind di Merauke.

Pengabdian yang paling dekat dengan kegiatan ini dilakukan oleh Wahyudin et al. (2025) melalui bimbingan teknis bagi pengurus Yayasan Papua Penuh Damai (PAPEDA). Kegiatan tersebut berfokus pada persiapan pemberdayaan KAT, terutama pemetaan sosial, penajagan awal, studi kelayakan, semiloka, perencanaan program, dan penyiapan kondisi masyarakat. Kegiatan YAMSA di Merauke memiliki titik temu pada penguatan lembaga lokal, tetapi berbeda pada orientasi pelaksanaan. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi asesmen kebutuhan, bimbingan teknis, simulasi, praktik pendampingan lapangan, coaching, monitoring dan evaluasi, serta penguatan tata kelola organisasi dalam satu siklus penguatan kapasitas lembaga lokal. Konteks kelembagaan YAMSA di Merauke menjadi ruang penerapan model proses tersebut, terutama dalam menghadapi keragaman sosial budaya dan kendala akses pendampingan KAT. Dengan demikian, kontribusi artikel bukan sekadar mendeskripsikan pelaksanaan bimtek, tetapi menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran diterjemahkan ke dalam praktik lapangan dan kemudian dihubungkan kembali dengan sistem kerja organisasi.

Perspektif partisipatif yang digunakan dalam kegiatan juga sejalan dengan literatur internasional yang menekankan pentingnya pengintegrasian pengetahuan lokal ke dalam program berbasis komunitas. Boadu et al. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna dan sistem pengetahuan lokal perlu menjadi bagian dari desain program agar

pembangunan komunitas lebih berkelanjutan. Clarke et al. (2022) menegaskan bahwa evaluasi pada komunitas adat perlu bersifat partisipatif dan responsif secara budaya. Dengan demikian, urgensi penguatan kapasitas YAMSA bukan hanya terletak pada peningkatan kemampuan individual pengurus, tetapi juga pada kemampuan lembaga mengembangkan pola kerja yang dapat diterapkan dalam konteks sosial budaya masyarakat yang beragam.

Berdasarkan kajian terdahulu, Wahyudin et al. (2025) menempatkan bimbingan teknis sebagai tahap persiapan pemberdayaan KAT bagi pengurus PAPEDA, sedangkan Sidiq (2020a) menekankan pentingnya analisis kebutuhan dan penentuan prioritas program sebagai dasar pemberdayaan. Trenggano et al. (2020) lebih berfokus pada implementasi kebijakan pemberdayaan KAT dan pentingnya sinergi antaraktor pelaksana, sementara Lede Bili dan Nugroho E.W. (2023) menyoroti persoalan keberlanjutan program pemberdayaan. Pada aspek sosial budaya, Silubun et al. (2024) menekankan pentingnya kelembagaan adat dan nilai budaya masyarakat Marind, sedangkan Enala et al. (2025) menyoroti partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, kontribusi spesifik kegiatan ini adalah model proses penguatan kapasitas yang menghubungkan asesmen kebutuhan–bimtek–simulasi–praktik lapangan–coaching–monitoring dan evaluasi–tata kelola kelembagaan sebagai satu rangkaian pembelajaran. Integrasi tersebut memungkinkan pengetahuan yang diperoleh dalam bimtek diuji di lapangan, direfleksikan melalui coaching, lalu diterjemahkan menjadi perangkat dan kebiasaan kerja organisasi. Kebaruan karena itu terutama terletak pada integrasi proses tersebut, sedangkan konteks YAMSA di Merauke memperlihatkan penerapannya pada lembaga lokal yang mendampingi KAT dalam kondisi geografis dan sosial budaya yang beragam.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian bertujuan memperkuat kapasitas pengurus YAMSA Cabang Merauke dalam perencanaan program berbasis kebutuhan, pendampingan partisipatif, monitoring dan evaluasi, dokumentasi, serta tata kelola kelembagaan. Secara khusus, artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan pengabdian di lapangan, dinamika partisipasi peserta, bentuk praktik yang dilakukan, faktor pendukung dan kendala, serta tindak lanjut yang diperlukan agar hasil bimbingan teknis dapat terintegrasi dalam sistem kerja organisasi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif, andragogi, dan berbasis kebutuhan. Pendekatan partisipatif diterapkan dengan menempatkan pengurus YAMSA sebagai mitra pembelajaran yang terlibat dalam identifikasi kebutuhan, diskusi, simulasi, praktik, monitoring, dan refleksi. Pendekatan andragogi mengacu pada prinsip pembelajaran orang dewasa yang menempatkan pengalaman peserta sebagai sumber belajar, menekankan relevansi langsung dengan tugas, berorientasi pada pemecahan masalah, serta mendorong keterlibatan peserta dalam proses belajar (Knowles et al., 2015; Merriam & Bierema, 2014). Prinsip tersebut diterapkan dengan menjadikan pengalaman pendampingan pengurus sebagai kasus pembelajaran, menggunakan hasil asesmen kebutuhan untuk menentukan materi, serta mengembangkan sesi melalui diskusi pengalaman, studi kasus, simulasi, role play, praktik lapangan, coaching, refleksi, dan

umpan balik. Dengan desain ini, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi menguji pengetahuan pada persoalan yang mereka hadapi dalam pekerjaan pendampingan.

Pelaksanaan berpusat pada YAMSA Cabang Merauke dan dikaitkan dengan kegiatan lapangan di wilayah pendampingan KAT. Dokumentasi kegiatan menyebut sekretariat YAMSA, Dinas Sosial Kabupaten Merauke, serta beberapa kampung sasaran, termasuk Kampung Yomop, Kampung Kwemzid, dan Kampung Snegi. Peserta utama yang dapat diidentifikasi secara konsisten dari laporan adalah pengurus YAMSA dan personel yang terlibat dalam proses pendampingan lapangan. Dinas Sosial tercatat dalam konteks koordinasi kegiatan, sedangkan dokumentasi sumber tidak memberikan daftar peserta yang cukup rinci untuk memastikan jumlah maupun komposisi setiap unsur pada seluruh sesi. Karena itu, artikel ini tidak membuat klaim jumlah peserta yang tidak terdokumentasi, tetapi menegaskan bahwa sasaran penguatan kapasitas adalah pengurus YAMSA yang menjalankan fungsi perencanaan, pendampingan, monitoring, dokumentasi, dan koordinasi kelembagaan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-reflektif melalui tahap reduksi, kategorisasi, dan verifikasi. Data hasil wawancara, FGD, observasi, dokumentasi, dan catatan proses diseleksi berdasarkan relevansinya dengan tujuan kegiatan, kemudian dikelompokkan ke dalam tema seperti proses bimbingan teknis, peningkatan kapasitas pendampingan, partisipasi peserta, serta faktor pendukung dan penghambat. Triangulasi dilakukan secara operasional dengan membandingkan temuan FGD dan wawancara dengan hasil observasi lapangan, dokumen organisasi, dokumentasi kegiatan, dan catatan proses. Sebagai contoh, informasi mengenai kebutuhan penguatan perencanaan dan pendampingan diperiksa kembali melalui latihan peserta dan praktik lapangan, sedangkan informasi mengenai kendala akses dibandingkan dengan catatan serta dokumentasi mobilitas kegiatan. Temuan yang muncul secara konsisten pada lebih dari satu sumber digunakan sebagai dasar interpretasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian antar-sumber, informasi tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai temuan, tetapi diperiksa kembali pada catatan proses dan konteks kegiatan serta dicatat sebagai keterbatasan apabila tidak tersedia bukti tambahan untuk melakukan konfirmasi.

Tahapan kegiatan disusun sebagai siklus penguatan kapasitas. Koordinasi dan asesmen kebutuhan digunakan untuk menentukan fokus materi. Bimbingan teknis kemudian dilaksanakan pada tiga bidang utama, yaitu perencanaan program berbasis kebutuhan, pendampingan partisipatif, serta monitoring dan evaluasi. Setelah materi disampaikan, peserta mengikuti simulasi dan latihan penyusunan perangkat. Tahap berikutnya berupa praktik dan pendampingan lapangan dengan coaching serta mentoring. Monitoring dan refleksi digunakan untuk mengidentifikasi kendala, memperbaiki pelaksanaan, dan merumuskan tindak lanjut kelembagaan.



Gambar 1. Alur pelaksanaan pengabdian penguatan kapasitas YAMSA

Skema menunjukkan bahwa kegiatan tidak berhenti pada sesi bimbingan teknis. Setiap tahap menghasilkan masukan bagi tahap berikutnya: asesmen menentukan materi, pelatihan menyediakan kerangka kerja, simulasi mempersiapkan penerapan, praktik lapangan menghasilkan pengalaman nyata, sedangkan monitoring dan refleksi menjadi dasar tindak lanjut organisasi.

Hasil dan Pembahasan

Persiapan, Koordinasi, dan Penetapan Kebutuhan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan pengurus YAMSA Cabang Merauke. Tahap ini digunakan untuk menyamakan pemahaman mengenai tujuan kegiatan, kelompok sasaran, kebutuhan organisasi, jadwal, lokasi, pembagian peran, serta bentuk dukungan mitra. Dalam konteks kegiatan lapangan, koordinasi tidak diperlakukan hanya sebagai tahapan administratif. Tim menggunakan forum awal untuk memperoleh gambaran tentang pengalaman pengurus ketika mendampingi masyarakat dan kesulitan yang muncul dalam penyusunan program, komunikasi dengan komunitas, dokumentasi, serta evaluasi kegiatan.

Asesmen kebutuhan dilakukan melalui percakapan terarah, FGD, observasi, dan penelaahan dokumen organisasi. Proses ini mengidentifikasi bahwa kebutuhan pengurus tidak berada pada satu aspek saja. Pengurus membutuhkan penguatan perencanaan program, teknik fasilitasi, pemetaan sosial, monitoring dan evaluasi, administrasi, pelaporan, dan koordinasi. Temuan awal tersebut kemudian disederhanakan menjadi tiga fokus

pembelajaran utama: perencanaan berbasis kebutuhan, pendampingan partisipatif, dan monitoring-evaluasi. Aspek tata kelola organisasi dimasukkan sebagai pengikat agar kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten

Koordinasi juga membantu menempatkan pengalaman peserta sebagai sumber materi. Kasus yang muncul dari pengalaman pendampingan dibawa ke ruang pelatihan untuk dibahas bersama. Dengan pola ini, materi tidak berdiri sebagai pengetahuan umum yang terpisah dari pekerjaan pengurus. Persoalan seperti penentuan prioritas kebutuhan, keterlibatan tokoh lokal, pencatatan perkembangan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan menjadi contoh nyata dalam latihan.



Gambar 2. Dokumentasi koordinasi dan kegiatan bersama mitra.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan Program Berbasis Kebutuhan

Sesi perencanaan program diarahkan pada perubahan cara menyusun kegiatan. Peserta diminta tidak langsung menentukan bentuk bantuan atau aktivitas, tetapi memulai dari informasi mengenai kondisi masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan membedakan masalah, kebutuhan, potensi, sumber daya, dan prioritas. Peserta kemudian berlatih menghubungkan masalah dengan tujuan program, kegiatan, keluaran, hasil yang diharapkan, indikator, serta pihak yang perlu dilibatkan.

Dalam proses latihan, pemetaan sosial diposisikan sebagai langkah untuk membaca kondisi komunitas secara lebih utuh. Pemetaan tidak hanya memuat data penduduk, tetapi juga aktor yang berpengaruh, hubungan kekerabatan, kelompok sosial, sumber daya lokal, akses layanan, jaringan yang tersedia, serta faktor yang dapat mendukung atau menghambat kegiatan. Peserta didorong untuk menghindari kesimpulan berdasarkan asumsi pendamping. Informasi perlu diperoleh melalui dialog dan pengamatan sehingga prioritas program lebih dekat dengan kondisi nyata masyarakat.



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan bersama mitra dan masyarakat

Latihan penyusunan rencana program memperlihatkan perubahan pada produk kerja peserta. Pada rancangan awal, beberapa usulan kegiatan masih bersifat luas dan belum mencantumkan indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan. Setelah diskusi dan umpan balik, rancangan diarahkan menjadi lebih lengkap dengan menghubungkan masalah, kebutuhan, tujuan, kegiatan, keluaran, hasil yang diharapkan, indikator, pihak yang dilibatkan, serta prioritas berdasarkan sumber daya dan waktu. Ketika peserta merumuskan kegiatan tanpa indikator, tim pengabdian mengarahkan diskusi pada bukti keberhasilan yang dapat diamati. Ketika usulan terlalu luas, peserta diminta mempersempit prioritas berdasarkan kebutuhan, sumber daya, kemampuan organisasi, dan waktu. Dengan demikian, perubahan yang terlihat bukan hanya pada pemahaman konsep, tetapi pada struktur rancangan program yang menjadi lebih spesifik dan operasional setelah memperoleh umpan balik.

Produk kerja pada tahap ini berupa rancangan program sederhana yang dapat digunakan sebagai alat kerja. Dibandingkan rancangan awal yang masih umum, hasil latihan setelah umpan balik mulai memuat keterkaitan antara hasil asesmen, prioritas kebutuhan, tujuan, kegiatan, indikator, dan pihak yang perlu dilibatkan. Format perencanaan dibuat sederhana agar pengurus dapat mengulang proses serupa ketika menghadapi lokasi atau kebutuhan yang berbeda. Dengan demikian, bimbingan teknis perencanaan tidak diarahkan menghasilkan satu dokumen statis, tetapi membangun kebiasaan menyusun program dari asesmen dan data lapangan serta memperbaiki rancangan berdasarkan hasil refleksi.

Praktik Pendampingan Partisipatif dan Fasilitasi

Fokus berikutnya adalah keterampilan pendampingan partisipatif. Peserta berlatih mengubah posisi pendamping dari pihak yang paling banyak memberi instruksi menjadi fasilitator yang membuka ruang percakapan. Latihan dilakukan melalui simulasi FGD, role play, pertanyaan terbuka, teknik mendengarkan, penggalan kebutuhan, dan penanganan

perbedaan pendapat. Situasi latihan dikaitkan dengan pengalaman nyata ketika pendamping harus berhadapan dengan tokoh adat, kelompok keluarga, pemuda, perempuan, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan berbeda.

Simulasi memperlihatkan bahwa kemampuan fasilitasi tidak hanya bergantung pada penguasaan materi. Peserta perlu mampu mengatur alur diskusi, menghindari dominasi satu pihak, merangkum pendapat, mengonfirmasi kembali informasi, dan membangun kesepakatan. Dalam konteks komunitas adat, pendamping juga perlu memperhatikan tata cara berkomunikasi, posisi tokoh lokal, waktu yang dianggap tepat untuk berdiskusi, serta kebiasaan masyarakat dalam mengambil keputusan.

Praktik lapangan kemudian menjadi ruang untuk menguji keterampilan tersebut. Dokumentasi menunjukkan adanya pertemuan kelompok yang dilakukan secara informal dan terbuka, baik pada siang maupun malam hari. Bentuk pertemuan menyesuaikan kondisi masyarakat; peserta duduk bersama komunitas dan menggunakan percakapan kelompok sebagai media untuk memperoleh informasi, menjelaskan kegiatan, serta membahas persoalan. Penyesuaian ini penting karena proses pendampingan di lapangan tidak selalu dapat mengikuti format ruang kelas.

Pada tahap ini, tim pengabdian menjalankan fungsi coaching. Setelah kegiatan, pengurus didorong mengevaluasi cara membuka diskusi, keterlibatan peserta, informasi yang belum tergal, serta langkah yang perlu diperbaiki. Refleksi langsung membuat pengalaman lapangan menjadi materi pembelajaran berikutnya.



Gambar 4. Diskusi partisipatif dan coaching dalam kegiatan lapangan

Pendampingan Lapangan sebagai Ruang Pembelajaran

Pendampingan lapangan menjadi pembeda penting antara kegiatan ini dan pelatihan yang hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Pengurus menghadapi langsung variasi situasi, aksesibilitas, waktu pertemuan, dan dinamika komunitas. Materi yang telah dipelajari kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan sederhana: menyiapkan pertemuan, menentukan pihak yang perlu ditemui, membuka percakapan, mengidentifikasi persoalan, mencatat potensi, mengamati hubungan sosial, dan menyusun catatan tindak lanjut.

Kegiatan di lapangan tidak selalu berlangsung pada kondisi yang ideal. Dokumentasi menunjukkan pertemuan yang dilakukan di ruang terbuka dan Pendampingan lapangan menjadi pembeda penting antara kegiatan ini dan pelatihan yang hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Pengurus menghadapi langsung variasi situasi, aksesibilitas, waktu pertemuan, dan dinamika komunitas. Materi yang telah dipelajari kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan sederhana: menyiapkan pertemuan, menentukan pihak yang perlu ditemui, membuka percakapan, mengidentifikasi persoalan, mencatat potensi, mengamati hubungan sosial, dan menyusun catatan tindak lanjut.

Kegiatan di lapangan tidak selalu berlangsung pada kondisi yang ideal. Dokumentasi menunjukkan pertemuan yang dilakukan di ruang terbuka dan pada malam hari. Keadaan tersebut menggambarkan kebutuhan adaptasi terhadap aktivitas masyarakat dan kondisi lokal. Tim serta pengurus perlu menyesuaikan waktu, bentuk pertemuan, serta cara penyampaian agar komunikasi tetap dapat berlangsung. Dalam situasi seperti ini, fleksibilitas menjadi bagian dari keterampilan pendamping.

Praktik juga menegaskan pentingnya membedakan kehadiran masyarakat dengan partisipasi. Catatan proses mengarahkan pengurus untuk memperhatikan siapa yang aktif berbicara, isu yang disampaikan, kelompok yang belum terwakili, dan cara keputusan atau tindak lanjut dibentuk dalam pertemuan. Dokumentasi yang tersedia menunjukkan adanya keterlibatan tokoh lokal dan anggota komunitas dalam diskusi kelompok, tetapi tidak mencatat secara konsisten identitas atau kategori setiap pembicara pada seluruh pertemuan. Karena itu, artikel ini tidak mengklaim distribusi partisipasi yang tidak terdokumentasi. Dalam coaching, keterbatasan tersebut justru digunakan sebagai bahan refleksi agar pengurus tidak hanya mencatat jumlah kehadiran, tetapi juga keterwakilan perempuan, pemuda, kelompok keluarga atau marga, serta aktor lain yang relevan. Keputusan komunitas diarahkan dibentuk melalui rangkuman pendapat, konfirmasi kembali kepada peserta, dan pencatatan kesepakatan atau isu yang masih memerlukan pembahasan lanjutan.

Pengalaman lapangan selanjutnya dibawa kembali ke proses coaching. Masalah yang tidak terselesaikan pada saat pertemuan tidak dipaksakan untuk segera disimpulkan. Pengurus diarahkan mencatat pertanyaan yang masih terbuka, kebutuhan informasi tambahan, serta pihak yang perlu ditemui. Dengan pola tersebut, pendampingan menjadi proses bertahap yang menghindari keputusan tergesa-gesa.

Penguatan Monitoring, Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan

Sesi monitoring dan evaluasi diarahkan pada perangkat yang sederhana dan dapat digunakan oleh organisasi. Peserta berlatih menentukan indikator yang sesuai dengan tujuan kegiatan, membedakan data proses dan hasil, mencatat kendala, serta menyusun rekomendasi. Tim menghindari pembuatan instrumen yang terlalu rumit karena tujuan utama adalah membangun kebiasaan monitoring yang dapat dilakukan secara rutin oleh pengurus. Dalam pembahasan, dokumentasi diposisikan sebagai bagian dari pengelolaan program, bukan hanya bukti foto. Catatan pertemuan, daftar isu, keputusan, pembagian tugas, perubahan rencana, dan tindak lanjut perlu disimpan agar organisasi dapat melacak perkembangan. Dokumentasi semacam ini mempermudah penyusunan laporan dan membantu pengurus ketika harus menjelaskan alasan perubahan program kepada pihak lain.

Program KAT menyentuh banyak sektor, sehingga laporan yang ringkas tetapi jelas dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, lembaga sosial, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain. Peserta diarahkan menyusun laporan yang menjawab empat pertanyaan dasar: apa yang dilakukan, siapa yang terlibat, apa yang ditemukan atau berubah, dan apa tindak lanjut yang diperlukan.

Penguatan Tata Kelola YAMSA

Pelaksanaan pengabdian memperlihatkan bahwa peningkatan keterampilan individual perlu ditautkan dengan tata kelola lembaga. Pengurus yang mampu melakukan asesmen tetap membutuhkan pembagian tugas yang jelas; pengurus yang memahami Monev memerlukan format pencatatan yang digunakan bersama; dan kemampuan fasilitasi perlu didukung oleh koordinasi agar informasi lapangan menjadi bahan perencanaan organisasi. Karena itu, kegiatan memasukkan pembahasan mengenai perencanaan kerja, administrasi, dokumentasi, koordinasi, pelaporan, dan jejaring. Fokusnya bukan merombak struktur organisasi, melainkan membantu pengurus melihat bahwa proses pendampingan harus memiliki alur informasi. Hasil asesmen perlu masuk ke perencanaan, perkembangan lapangan perlu masuk ke monitoring, dan hasil monitoring perlu dibahas dalam evaluasi serta keputusan tindak lanjut.

Penguatan tata kelola juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu atau dua individu. Format kerja yang terdokumentasi memungkinkan pengetahuan dipelajari oleh pengurus lain. Modul, format perencanaan, panduan pemetaan sosial, dan perangkat Monev dapat digunakan kembali ketika YAMSA melakukan pendampingan di lokasi yang berbeda. Dengan cara ini, hasil pengabdian diarahkan menjadi perangkat organisasi, bukan hanya pengalaman peserta yang hadir.

Modal Sosial, Kearifan Lokal, dan Penyesuaian Pendampingan

Dalam kegiatan lapangan, pemahaman terhadap aktor lokal dan hubungan sosial menjadi bagian penting dari proses. Pengurus diarahkan untuk tidak memandang komunitas sebagai kelompok yang homogen. Tokoh adat, keluarga atau marga, pemuda, perempuan, tokoh agama, dan kelompok lain dapat mempunyai posisi serta kepentingan yang berbeda. Pemetaan aktor membantu pendamping menentukan strategi komunikasi dan mencegah proses hanya bergantung pada satu pintu informasi.

Kearifan lokal dibahas bukan sebagai materi teoritis yang terpisah, tetapi sebagai pertimbangan praktis ketika menyusun jadwal, memilih cara berkomunikasi, memahami tata hubungan, dan menilai potensi komunitas. Dokumentasi pertemuan memperlihatkan penggunaan bentuk diskusi yang menyesuaikan ruang dan waktu masyarakat. Pendamping hadir dalam setting komunitas, bukan memindahkan seluruh proses ke ruang formal. Hal ini memberi ruang lebih besar bagi informasi lokal untuk muncul.

Pendekatan tersebut juga menuntut kehati-hatian. Penghormatan terhadap tokoh adat tidak berarti mengabaikan suara kelompok lain. Dalam coaching, pengurus perlu memeriksa kembali siapa yang telah dan belum terlibat. Prinsip ini penting agar penggunaan struktur lokal mendukung proses inklusif dan tidak memperkuat dominasi yang mungkin sudah ada dalam komunitas.

Faktor Pendukung, Kendala Lapangan, dan Strategi Adaptasi

Faktor pendukung utama adalah adanya kebutuhan nyata dari YAMSA terhadap peningkatan kapasitas dan keterlibatan pengurus dalam proses pembelajaran. Relevansi materi dengan pekerjaan sehari-hari membuat diskusi lebih mudah diarahkan pada persoalan konkret. Pengalaman pengurus juga memperkaya latihan karena contoh yang dibahas berasal dari situasi yang mereka hadapi sendiri. Kedekatan YAMSA dengan masyarakat menjadi modal lain. Hubungan yang telah terbentuk memudahkan pembukaan komunikasi, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk bekerja secara sistematis. Bimbingan teknis membantu pengurus menata pengalaman lapangan ke dalam kerangka asesmen, perencanaan, fasilitasi, dan monitoring. Dengan demikian, pengetahuan lokal organisasi dapat dikombinasikan dengan perangkat kerja yang lebih terstruktur.

Kendala paling nyata adalah kondisi geografis dan mobilitas. Dokumentasi menunjukkan akses lapangan yang membutuhkan kendaraan roda dua dan perjalanan yang tidak selalu mudah. Hambatan ini memengaruhi desain monitoring karena kunjungan tidak dapat dirancang terlalu sering atau bergantung sepenuhnya pada tatap muka di lokasi. Frekuensi kunjungan perlu disesuaikan dengan akses, waktu tempuh, ketersediaan transportasi, dan kebutuhan logistik, sementara setiap kunjungan perlu dimanfaatkan untuk menghimpun catatan perkembangan dan menetapkan tindak lanjut yang jelas. Untuk menjaga keberlanjutan pendampingan di antara kunjungan, pengurus diarahkan menggunakan format monitoring sederhana, pencatatan rutin, pembahasan hasil lapangan dalam forum internal, dan koordinasi dengan aktor lokal. Dengan demikian, strategi adaptasi tidak hanya berupa penyesuaian jadwal, tetapi juga penguatan sistem informasi organisasi agar monitoring tetap berjalan ketika intensitas kunjungan lapangan harus dibatasi. Kendala berikutnya adalah keragaman sosial budaya. Teknik yang efektif di satu lokasi belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di lokasi lain. Oleh karena itu, kegiatan tidak menghasilkan satu prosedur komunikasi yang kaku. Pengurus justru diarahkan menggunakan asesmen awal, membaca aktor, dan memilih cara fasilitasi sesuai konteks.

Tantangan lain berkaitan dengan keberlanjutan setelah kegiatan pengabdian berakhir. Penggunaan perangkat hanya akan berkelanjutan jika dimasukkan ke dalam sistem kerja YAMSA. Karena itu, tindak lanjut yang paling penting adalah penggunaan rutin format perencanaan dan Monev, pembahasan hasil lapangan dalam rapat internal, pembaruan pemetaan sosial, serta transfer pengetahuan kepada pengurus lain.



Gambar 5. Kondisi mobilitas yang menggambarkan tantangan akses pendampingan lapangan

Capaian Proses dan Tindak Lanjut

Capaian pengabdian lebih tepat dibaca sebagai penguatan proses kerja daripada sebagai perubahan yang dapat dinyatakan secara statistik. Pertama, pengurus memperoleh ruang untuk menyusun program dengan alur yang lebih jelas dari identifikasi kebutuhan hingga indikator. Kedua, teknik fasilitasi dipraktikkan melalui simulasi dan interaksi lapangan. Ketiga, monitoring dan dokumentasi ditempatkan sebagai bagian dari siklus program. Keempat, tata kelola organisasi dibahas sebagai prasyarat agar kompetensi individual dapat menjadi kapasitas kelembagaan. Capaian lain adalah tersedianya pengalaman lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran organisasi. Pertemuan dengan komunitas memberikan contoh konkret tentang pentingnya adaptasi waktu, cara komunikasi, keterlibatan aktor, dan pencatatan informasi. Pengalaman tersebut menjadi lebih bernilai ketika dibahas kembali melalui coaching dan refleksi, karena peserta tidak hanya mengingat kegiatan tetapi juga mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki.

Tabel 1 merangkum keterkaitan antara kebutuhan awal, kegiatan yang dilakukan, bukti proses, dan tindak lanjut yang disarankan. Ringkasan ini sengaja menggunakan indikator kualitatif yang tersedia dalam laporan, tanpa menambahkan angka hasil yang tidak terdokumentasi.

Tabel 1. Ringkasan proses, bukti kegiatan, dan tindak lanjut

Kebutuhan	Pelaksanaan	Bukti proses	Tindak lanjut
Perencanaan program	Bimtek need assessment, pemetaan masalah-potensi, latihan tujuan dan indikator	Latihan penyusunan rencana dan pembahasan kasus	Gunakan format perencanaan pada setiap lokasi baru dan perbarui data kebutuhan.
Pendampingan partisipatif	Simulasi FGD, role play, praktik komunikasi dan fasilitasi	Diskusi komunitas dan praktik lapangan terdokumentasi	Lakukan refleksi setelah pertemuan dan periksa keterwakilan kelompok.
Monitoring-evaluasi	Latihan indikator, catatan perkembangan, evaluasi dan rekomendasi	Perangkat Monev sederhana dan pembahasan hasil proses	Tetapkan jadwal monitoring dan forum evaluasi internal.
Dokumentasi-pelaporan	Latihan pencatatan kegiatan, isu, keputusan, dan tindak lanjut	Dokumentasi foto dan catatan proses kegiatan	Standarkan format catatan dan arsip kegiatan organisasi.
Tata kelola organisasi	Pembahasan pembagian tugas, koordinasi, dan jejaring	Kesepakatan kebutuhan integrasi hasil pelatihan ke sistem kerja	Transfer perangkat kepada pengurus lain dan gunakan dalam rapat program.
Adaptasi konteks lokal	Pemetaan aktor, perhatian pada nilai lokal dan akses lapangan	Pertemuan menyesuaikan setting, waktu, dan kondisi komunitas	Pertahankan fleksibilitas metode serta libatkan aktor lokal secara inklusif.

Sumber: sintesis pelaksanaan kegiatan pengabdian, 2026.

Secara keseluruhan, pola pelaksanaan memperlihatkan bahwa bimbingan teknis menjadi lebih kontekstual ketika diintegrasikan dengan proses kerja, bukan ditempatkan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Temuan proses ini selaras dengan gagasan bahwa organisasi lokal membutuhkan kapasitas untuk mendefinisikan persoalan, bertindak, dan belajar dari pengalaman (Langmann et al., 2024), tetapi artikel ini menempatkan perhatian utama pada rangkaian yang benar-benar dilakukan selama kegiatan, yaitu asesmen, bimbingan teknis, simulasi, praktik lapangan, coaching, monitoring, refleksi, dan penguatan tata kelola. Integrasi tersebut penting agar hasil pengabdian tidak berhenti pada klaim peningkatan pengetahuan, melainkan dapat ditelusuri melalui perubahan rancangan kerja, praktik pendampingan, perangkat monitoring, dan mekanisme tindak lanjut yang digunakan oleh mitra.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengurus YAMSA Cabang Merauke lebih efektif ketika dilakukan melalui proses yang terintegrasi, mulai dari asesmen kebutuhan, bimbingan teknis, simulasi, praktik lapangan, coaching, monitoring dan evaluasi, refleksi, hingga penguatan tata kelola kelembagaan. Proses ini memperkuat kemampuan pengurus dalam menyusun program berbasis kebutuhan, melakukan

pendampingan partisipatif, menyesuaikan strategi dengan kondisi sosial budaya masyarakat, serta mengelola dokumentasi dan tindak lanjut secara lebih sistematis. Meskipun capaian belum dapat diukur secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test, bukti proses dan dokumentasi menunjukkan bahwa model tersebut memberikan dasar bagi YAMSA untuk mengembangkan pendampingan KAT yang lebih terencana, kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, YAMSA perlu menetapkan format asesmen, perencanaan, catatan lapangan, monitoring, dan evaluasi sebagai perangkat kerja standar serta melaksanakan refleksi internal secara berkala. Pemetaan sosial dan kebutuhan masyarakat juga perlu diperbarui secara periodik agar program tetap relevan dengan perubahan kondisi lapangan. Penguatan kapasitas berikutnya dapat diarahkan pada penyusunan proposal, pengelolaan data, advokasi sosial, mobilisasi sumber daya, dan pengembangan jejaring. Kegiatan selanjutnya juga disarankan menggunakan pre-test dan post-test, rubrik keterampilan, serta penilaian penerapan perangkat di lapangan agar perubahan kapasitas dapat diukur dan dilaporkan secara lebih kuat.

Daftar Pustaka

- Azis, Y. Z., Rahail, E. B., & Wijaya, N. (2026). Model kemitraan pemberdayaan masyarakat adat Marind dalam pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan di Papua Selatan. *Lebah*, 19(3), 324–330. <https://doi.org/10.35335/lebah.v19i3.507>
- Bismar, B., Teturan, Y. E., & Maturbongs, E. E. (2024). Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua guna meningkatkan perekonomian di Kabupaten Merauke. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 3(2), 76–86. <https://doi.org/10.67138/jakd.v3i2.76>
- Boadu, E. S., Ile, I., & Oduro, M. Y. (2021). Indigenizing participation for sustainable community-based development programmes in Ghana. *Journal of Asian and African Studies*, 56(7), 1658–1677. <https://doi.org/10.1177/0021909620979333>
- Bryan, T. K. (2019). Toward a contingency model for the relationship between capacity and effectiveness in nonprofit organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 48(4), 885–897. <https://doi.org/10.1177/0899764018815617>
- Clarke, G. S., Douglas, E. B., House, M. J., Hudgins, K. E. G., Campos, S., & Vaughn, E. E. (2022). Empowering Indigenous communities through a participatory, culturally responsive evaluation of a federal program for older Americans. *American Journal of Evaluation*, 43(4), 484–503. <https://doi.org/10.1177/10982140211030557>
- Enala, S. H., Mana, F. A., Prasetya, M. N., & Adam, A. F. (2025). Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pembangunan lokal di Kabupaten. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi*, 2(1), 8–17. <https://journal.papsel.org/index.php/JPI/article/view/145>
- Fu, J. S., & Shumate, M. (2020). Developing and validating a capacity instrument for Chinese and U.S. NGOs. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 49(3), 631–652. <https://doi.org/10.1177/0899764019889179>
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316342855>

- Langmann, S., Bezemer, P.-J., & Pick, D. (2024). Local community capacity building: Exploring non-governmental organizations approaches in Tamil Nadu. *Community Development Journal*, 59(3), 438–456. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsad009>
- Lede Bili, M. N., & Nugroho E.W., T. (2023). Kendala pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(1), 58–67. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i1.316>
- Manik, R. (2022). Local wisdom of the Marind-Anim tribe in solving social problems and its impact on building a climate of religious moderation in Merauke District. *Jurnal Ad'ministrare*, 9(2), 641–650. <https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.41514>
- Rantika, S. A., & Rahman, M. (2025). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(2), 22–30. <https://doi.org/10.25134/jise.v4i2.132>
- Rusmiyati, C. (2020). Komunitas Adat Terpencil menggapai harapan: Studi pada Suku Dayak Deah Sialing Kabupaten Tabalong. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(3), 229–246.
- Sidiq, R. S. S. (2020a). Analisis SWOT dalam persiapan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28230>
- Sidiq, R. S. S. (2020b). Model pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Reformasi*, 10(2), 217–227. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1954>
- Silubun, J. A., Pelu, H. D. A., Corputty, F., & Hidayat, K. (2024). Penguatan sistem pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat Marind di Provinsi Papua Selatan. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1), 107–119. <https://doi.org/10.35724/jrj.v8i1.6210>
- Simangunsong, I. T., Irsyam, M., Sari, P. R., & Jamlean, V. (2024). Program pembelajaran dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kampung Kamno Sari, Papua Selatan. *Jurnal Mitra Prima*, 6(1). https://doi.org/10.34012/mitra_prima.v6i1.4898
- Tambajong, H., Wayankau, I. H., Tjilen, A. P., Tambaib, B., & Riyanto, P. (2025). Integrating Marind Indigenous knowledge into public sector human resource development: A pathway to sustainable public management in Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 8(1), 50–60. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i1.7294>
- Trenggano, M., Effendy, K., Tahir, I., & Lukman, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 97–112. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v12i2.1362>
- Wahyudin, U., Lefaan, A., & Manggaprouw, J. F. (2025). Penguatan kapasitas persiapan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui bimbingan teknis pengurus Yayasan Papua Penuh Damai (PAPEDA). *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.37858/aktivasi.v7i1.584>